



PENETAPAN

Nomor 4/Pdt.P/2021/PA.Dth

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Dataran Hunimoa yang memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan Isbat nikah yang diajukan oleh:

Hakim Boufakar bin Abd. Rahim Boufakar, NIK 9201070505640004, Tempat dan tanggal lahir Artafella, 05 Mei 1964, Umur 57 tahun, Agama Islam, Pendidikan terakhir SD, Pekerjaan Petani, Tempat tinggal di Desa Administratif Artafella, Kecamatan Kian Darat, Kabupaten Seram Bagian Timur, sebagai **Pemohon I**;

Nursia Kelsaba binti Ismail Kelsaba, NIK 8105024402650001, Tempat dan tanggal lahir SBT, 04 Februari 1965, Umur 56 tahun, Agama Islam, Pendidikan terakhir SD, Pekerjaan Ibu rumah tangga, Tempat tinggal di Desa Administratif Artafella, Kecamatan Kian Darat, Kabupaten Seram Bagian Timur, sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II dalam surat permohonannya tanggal 08 Maret 2021 telah mengajukan permohonan Isbat Nikah, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Dataran Hunimoa dengan Nomor 4/Pdt.P/2021/PA.Dth, tanggal 08 Maret 2021, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

Hal. 1 dari 16 hal. Pen. No. 4/Pdt.P/2021/PA.Dth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada tanggal 27 Maret 1998, Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di Desa Kian Darat, Kecamatan Seram Timur, Kabupaten Maluku Tengah (Sekarang Desa Administratif Artafella, Kecamatan Kian Darat, Kabupaten Seram Bagian Timur);
2. Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah adalah adik kandung Pemohon II yang bernama Ahmad bin Ismail Kelsaba, dengan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi nikah yang bernama M. Yusuf Boufakar bin Abd. Rahim Boufakar dan Husen Kelsaba bin Roba Kelsaba, dengan maskawin berupa uang sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dibayar tunai dan telah terjadi ijab qabul antara wali nikah dengan Pemohon I;
3. Bahwa pada saat akad nikah, Pemohon I berstatus perjaka dan Pemohon II berstatus perawan;
4. Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan darah dan sesusuan serta telah memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
5. Bahwa setelah akad nikah tersebut, Pemohon I dan Pemohon II bertempat tinggal di Desa Administratif Artafella, Kecamatan Kian Darat, Kabupaten Seram Bagian Timur;
6. Bahwa dari perkawinan tersebut, Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 1 (satu) orang anak kandung yang bernama Safina Boufakar binti Hakim Boufakar, perempuan, lahir di Artafella, tanggal 07 Oktober 2008;
7. Bahwa selama pernikahan tersebut, tidak ada pihak ketiga yang menggugat pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II tersebut, dan selama itu juga Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai serta tetap beragama Islam;
8. Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II belum terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kian Darat sebagaimana Surat Keterangan Nomor: 27/Kua.25.08.12/PW.01/2/2021, tanggal 24 Februari 2021, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Kian Darat Kabupaten Seram Bagian Timur;

Hal. 2 dari 16 hal. Pen. No. 4/Pdt.P/2021/PA.Dth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa penyebab pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama dikarenakan faktor ekonomi;
10. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkan Penetapan Isbat Nikah dari Pengadilan Agama Dataran Hunimoo untuk melengkapi administrasi kependudukan seperti mengurus Kutipan Akta Nikah dan Akta Kelahiran Anak;
11. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak sanggup untuk membayar biaya perkara karena termasuk orang yang tidak mampu, sesuai dengan Surat Keterangan Tidak Mampu Nomor: 141.18/NA/Art/II/2021, yang dikeluarkan oleh Karateker Desa Administratif Artafella, Kecamatan Kian Darat, Kabupaten Seram Bagian Timur, tanggal 22 Februari 2021, oleh karena itu mohon diizinkan untuk berperkara secara cuma-cuma;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, maka Pemohon I dan Pemohon II mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Dataran Hunimoo Cq. Majelis Hakim kiranya dapat menerima dan memeriksa selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya sebagai berikut:

PRIMER:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (Hakim Boufakar bin Abd. Rahim Boufakar) dengan Pemohon II (Nursia Kelsaba binti Ismail Kelsaba) yang dilaksanakan pada tanggal 27 Maret 1998 di Desa Kian Darat, Kecamatan Seram Timur, Kabupaten Maluku Tengah (Sekarang Desa Administratif Artafella, Kecamatan Kian Darat, Kabupaten Seram Bagian Timur);
3. Membebaskan Pemohon I dan Pemohon II dari biaya perkara;

SUBSIDER:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II tersebut, telah diumumkan oleh Pengadilan Agama Dataran Hunimoo di papan pengumuman Pengadilan Agama Dataran Hunimoo pada tanggal 08 Maret 2021, sesuai ketentuan yang berlaku, namun hingga perkara ini disidangkan tidak ada seorang pun yang berkeberatan terhadap permohonan tersebut;

Hal. 3 dari 16 hal. Pen. No. 4/Pdt.P/2021/PA.Dth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II telah menghadap ke muka sidang, selanjutnya Majelis Hakim telah memberikan penjelasan terkait permohonannya berdasarkan hukum Islam, akan tetapi Pemohon I dan Pemohon II menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat bukti, berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK: 9201070505640004, atas nama Hakim Boufakar, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Sorong, tanggal 26 Februari 2015, dan Kartu Tanda Penduduk NIK: 8105024402650001, atas nama Nursia Boufakar, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Seram Bagian Timur, tanggal 30 Agustus 2016, bukti tersebut telah di-*nazege/en* dan cocok dengan aslinya, bukti P.1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor: 8105020704081069, atas nama Kepala Keluarga Hakim Boufakar, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Seram Bagian Timur, tanggal 18 Februari 2019, bukti tersebut telah di-*nazege/en* dan cocok dengan aslinya, bukti P.2;
3. Asli Surat Keterangan Nomor 27/kua 25.08.12/Pw.01/2/2021, tanggal 24 Februari 2021, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Kian Darat Kabupaten Seram Bagian Timur, bukti tersebut telah di-*nazege/en*, bukti P.3;

B. Saksi:

1. Abdul Wahab Rumaday bin Rumaday, Tempat dan tanggal lahir, Artafella, 12 Juli 1948, Agama Islam, Pekerjaan Petani, Tempat tinggal di Desa Administratif Artafella, Kecamatan Kian Darat, Kabupaten Seram Bagian Timur, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi adalah tetangga Pemohon I dan Pemohon II;
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II;

Hal. 4 dari 16 hal. Pen. No. 4/Pdt.P/2021/PA.Dth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa hubungan Pemohon I dengan Pemohon II adalah suami istri yang menikah pada tanggal 27 Maret 1998 di Desa Administratif Artafella, Kecamatan Kian Darat, Kabupaten Seram Bagian Timur;
- Bahwa ketika akad nikah, Pemohon I berstatus perjaka dan Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa yang menjadi wali nikah dalam pernikahan tersebut adalah adik kandung Pemohon II yang bernama Ahmad bin Ismail Kelsaba, namun pada saat akad nikah mewakilkan kepada imam masjid yang bernama M. Doni Kelsaba;
- Bahwa saksi melihat dan mendengar ijab kabul antara wali nikah dengan Pemohon I;
- Bahwa pemikahan tersebut disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi nikah yaitu M. Yusuf Boufakar bin Abd. Rahim Boufakar dan Husen Kelsaba bin Roba Kelsaba;
- Bahwa pada pernikahan tersebut Pemohon I memberikan mahar kepada Pemohon II berupa uang sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dibayar tunai;
- Bahwa saat ini Pemohon I dengan Pemohon II telah dikaruniai 1 (satu) orang anak kandung, dan saat ini anak tersebut berada dalam pengasuhan bersama Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada halangan untuk menikah, karena keduanya tidak mempunyai hubungan keluarga, baik sedarah maupun sesusuan;
- Bahwa sejak menikah hingga saat ini, Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai, dan tidak pernah pula murtad, baik keduanya maupun salah satu diantaranya, dan tidak ada orang lain yang keberatan terhadap pernikahan tersebut;
- Bahwa tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan isbat nikah ini untuk mengurus buku nikah;

2. M. Yusuf Boufakar bin Abd. Rahim Boufakar, Tempat dan tanggal lahir, Artafella, 03 Mei 1970, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Tempat tinggal di Desa Kian Darat, Kecamatan Kian Darat, Kabupaten Seram

Hal. 5 dari 16 hal. Pen. No. 4/Pdt.P/2021/PA.Dth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bagian Timur, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah kakak kandung Pemohon I;
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa hubungan Pemohon I dengan Pemohon II adalah suami istri yang menikah pada tanggal 27 Maret 1998 di Desa Administratif Artafella, Kecamatan Kian Darat, Kabupaten Seram Bagian Timur;
- Bahwa ketika akad nikah, Pemohon I berstatus perjaka dan Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa yang menjadi wali nikah dalam pernikahan tersebut adalah adik kandung Pemohon II yang bernama Ahmad bin Ismail Kelsaba, namun pada saat akad nikah mewakili kepada imam masjid yang bernama M. Doni Kelsaba;
- Bahwa saksi melihat dan mendengar ijab kabul antara wali nikah dengan Pemohon I;
- Bahwa pemikahan tersebut disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi nikah yaitu M. Yusuf Boufakar bin Abd. Rahim Boufakar dan Husen Kelsaba bin Roba Kelsaba;
- Bahwa pada pernikahan tersebut Pemohon I memberikan mahar kepada Pemohon II berupa uang sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dibayar tunai;
- Bahwa saat ini Pemohon I dengan Pemohon II telah dikaruniai 1 (satu) orang anak kandung;
- Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada halangan untuk menikah, karena keduanya tidak mempunyai hubungan keluarga, baik sedarah maupun sesusuan;
- Bahwa sejak menikah hingga saat ini, Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai, dan tidak pernah pula murtad, baik keduanya maupun salah satu diantaranya, dan tidak ada orang lain yang keberatan terhadap pernikahan tersebut;
- Bahwa tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan isbat nikah ini untuk mengurus buku nikah;

Hal. 6 dari 16 hal. Pen. No. 4/Pdt.P/2021/PA.Dth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II menyampaikan kesimpulan secara lisan di muka sidang yang pada pokoknya tetap dengan dalil-dalil permohonannya agar pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II disahkan oleh pengadilan, serta mohon agar Majelis Hakim segera menjatuhkan penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam penetapan ini menunjuk kepada segala sesuatu sebagaimana termuat dalam berita acara sidang perkara ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II telah diumumkan di papan pengumuman Pengadilan Agama Dataran Hunimoo selama 14 hari sejak perkara didaftarkan, hal ini telah sesuai dengan dengan Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor KMA/032/SK/IV/2006 Tentang Pemberlakuan Buku II Edisi Revisi Tahun 2013 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan pada halaman 145, dan terhadap pengumuman tersebut tidak ada masyarakat yang merasa keberatan dengan permohonan Pemohon I dan Pemohon II hingga perkara ini diputus;

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan Pasal 49 ayat (2) angka 22 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, perkara permohonan Isbat Nikah termasuk kewenangan mutlak (*absolute competentie*) Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II mendalilkan bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 27 Maret 1998 di Desa Kian Darat, Kecamatan Seram Timur, Kabupaten Maluku Tengah (Sekarang Desa Administratif Artafella, Kecamatan Kian Darat, Kabupaten Seram Bagian Timur), dengan wali nikahnya adalah wali nasab yaitu adik kandung Pemohon II yang bernama Ahmad bin Ismail Kelsaba, dan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi nikah yang bernama M. Yusuf Boufakar bin Abd. Rahim Boufakar dan Husen Kelsaba bin Roba Kelsaba, dengan mas kawin

Hal. 7 dari 16 hal. Pen. No. 4/Pdt.P/2021/PA.Dth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berupa uang sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dibayar tunai, dan sejak menikah hingga sekarang Pemohon I dan Pemohon II belum pernah mendapatkan Kutipan Akta Nikah, dan tujuan pengajuan perkara Isbat Nikah ini agar perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II tercatat dan diakui oleh negara untuk melengkapi dokumen kependudukan Pemohon I dan Pemohon II yaitu Kutipan Akta Nikah;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II dan menghindari penyelundupan hukum, Majelis Hakim mewajibkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat bukti surat P.1, P.2, dan P.3 serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (Fotokopi Kartu Tanda Penduduk) Pemohon I dan Pemohon II yang merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai domisili Pemohon I dan Pemohon II di Kabupaten Seram Bagian Timur, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.2 (Fotokopi Kartu Keluarga) yang merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai anggota keluarga Pemohon I dan Pemohon II, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.3 (Asli Surat Keterangan) yang merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan bahwa perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II belum tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kian Darat Kabupaten Seram Bagian Timur, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa saksi pertama yang dihadirkan oleh Pemohon I dan Pemohon II, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Hal. 8 dari 16 hal. Pen. No. 4/Pdt.P/2021/PA.Dth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama yang dihadirkan oleh Pemohon I dan Pemohon II mengenai dalil-dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II, adalah fakta yang dilihat sendiri dan didengar sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon I dan Pemohon II, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi kedua yang dihadirkan oleh Pemohon I dan Pemohon II, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi kedua yang dihadirkan oleh Pemohon I dan Pemohon II mengenai dalil-dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II, adalah fakta yang dilihat sendiri dan didengar sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon I dan Pemohon II, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama dan saksi kedua yang dihadirkan oleh Pemohon I dan Pemohon II bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain, oleh karena itu keterangan 2 (dua) orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon I dan Pemohon II, bukti P.1, P.2, P.3, saksi pertama dan saksi kedua, terbukti fakta kejadian sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II berdomisili di Kabupaten Seram Bagian Timur;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah pasangan suami istri yang melangsungkan perkawinan pada tanggal 27 Maret 1998 di Desa Kian Darat, Kecamatan Seram Timur, Kabupaten Maluku Tengah (Sekarang Desa Administratif Artafella, Kecamatan Kian Darat, Kabupaten Seram Bagian Timur), dengan wali nikahnya adalah wali nasab yaitu adik kandung Pemohon II yang bernama Ahmad bin Ismail Kelsaba, dan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi nikah yang bernama M. Yusuf

Hal. 9 dari 16 hal. Pen. No. 4/Pdt.P/2021/PA.Dth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Boufakar bin Abd. Rahim Boufakar dan Husen Kelsaba bin Roba Kelsaba, dengan mahar berupa uang sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dibayar tunai;

- Bahwa ketika akad nikah, Pemohon I dan Pemohon II beragama Islam;
- Bahwa ketika akad nikah, Pemohon I berstatus perjaka dan Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak terdapat halangan untuk menikah yaitu keduanya tidak ada hubungan nasab, hubungan kerabat semenda ataupun hubungan sesusuan;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 1 (satu) orang anak kandung;
- Bahwa sejak menikah hingga saat ini Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai;
- Bahwa sejak menikah hingga saat ini Pemohon I dan Pemohon II masih beragama Islam dan tidak pernah murtad;
- Bahwa sejak menikah hingga saat ini, tidak ada pihak yang keberatan atau menggugat perkawinan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa pemikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama Kian Darat Kabupaten Seram Bagian Timur disebabkan faktor ekonomi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta kejadian tersebut tersebut terbukti diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II berdomisili di Kabupaten Seram Bagian Timur yang merupakan termasuk wilayah hukum (*yurisdiksi*) kompetensi relatif (*relative competentie*) Pengadilan Agama Dataran Hunimoo, sehingga pengajuan permohonan isbat nikah tersebut telah diajukan kepada pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa oleh karena Pemohon I dan Pemohon II adalah pasangan suami istri yang mohon diisbatkan perkawinannya, maka Pemohon I dan Pemohon II merupakan *standi in judicio* atau orang yang mempunyai hak dan kepentingan dalam perkara ini;

Hal. 10 dari 16 hal. Pen. No. 4/Pdt.P/2021/PA.Dth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut dilangsungkan setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;
- Bahwa perkawinan Pemohon I dengan Pemohon dilakukan menurut hukum Islam, sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo. Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam;
- Bahwa perkawinan Pemohon I dengan Pemohon telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan yaitu adanya calon suami, calon istri, wali nikah, 2 (dua) orang saksi, dan adanya ijab dan kabul, sesuai dengan ketentuan Pasal 14 sampai dengan Pasal 38 Kompilasi Hukum Islam;
- Bahwa perkawinan tersebut tidak dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah yang berwenang disebabkan faktor ekonomi;
- Bahwa Pemohon I telah memberikan mahar kepada Pemohon II berupa uang sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan penyerahannya dilakukan dengan tunai, sesuai dengan ketentuan Pasal 30 dan Pasal 33 Kompilasi Hukum Islam;
- Bahwa Pemohon II tidak dilarang melangsungkan perkawinan dengan Pemohon I karena sama-sama beragama Islam, sesuai dengan ketentuan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak dilarang melangsungkan perkawinan karena statusnya ketika akad nikah adalah perjaka dan perawan, sesuai dengan ketentuan Pasal 40 Kompilasi Hukum Islam;
- Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak terdapat halangan untuk menikah yaitu keduanya tidak ada hubungan nasab, hubungan kerabat semenda ataupun hubungan sesusuan, sesuai dengan ketentuan Pasal 39 Kompilasi Hukum Islam;
- Bahwa dari perkawinan tersebut Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 1 (satu) orang anak kandung;
- Bahwa sejak menikah hingga saat ini Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai;
- Bahwa sejak menikah hingga saat ini Pemohon I dan Pemohon II masih beragama Islam dan tidak pernah murtad;

Hal. 11 dari 16 hal. Pen. No. 4/Pdt.P/2021/PA.Dth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sejak menikah hingga saat ini, tidak ada pihak yang keberatan atau menggugat perkawinan Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa fakta-fakat tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam beberapa hadis dalam beberapa kitab yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim dalam pertimbangannya, sebagai berikut:

1. Kitab *Ushulul Fiqh*, halaman 930:

نُهَا اِنَّهَا عَلَى دَلِيلٍ لَهُ يَقُمُ لَمْ دَامَ مَا بِالزَّوْجِيَّةِ شَهِدَ فُلَانٌ زَوْجَةَ فُلَانَةَ عَرَفَ مِنْ

Artinya: "Barang siapa yang mengetahui bahwa seseorang perempuan itu sebagai isteri seorang laki-laki maka dinyatakan tetap sebagai suami isteri selama tidak ada bukti yang menentukan lain";

2. Kitab *I'alah al Thalibin*, Juz IV, halaman 254:

وَفِي الدَّعْوَى بِنِكَاحٍ عَلَى امْرَأَةٍ ذَكَرَ صَحْتَهُ وَشَرْطَهُ مِنْ نَحْوِ وَلِيِّ وَشَاهِدَيْنِ عَدْوَلَيْنِ

Artinya: "Pengakuan perkawinan dengan seorang perempuan harus dapat menyebutkan sahnya perkawinan dahulu, umpamanya wali dan dua orang saksi yang adil";

3. Kitab *Bughyah al Mustasyidin*, halaman 298:

فَإِذَا شَهِدَتْ لَهَا بَيِّنَةٌ عَلَى وَ قَفَ الدَّعْوَى ثَبَتَ الزَّوْجِيَّةُ وَالْإِرْثُ

Artinya: "Maka jika telah ada saksi-saksi yang menyaksikan atas perempuan itu, yang sesuai dengan gugatannya, maka tetaplah pernikahannya itu";

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta kejadian dan fakta hukum di atas selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa meskipun Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 7 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam menentukan bahwa hanya perkawinan yang dilakukan sebelum lahirnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang dapat dimohonkan pengesahannya di Pengadilan Agama, bila perkawinannya tersebut tidak dapat dibuktikan dengan akta nikah, sementara perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II dilakukan

Hal. 12 dari 16 hal. Pen. No. 4/Pdt.P/2021/PA.Dth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah lahirnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan tidak dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah yang berwenang, namun dikarenakan adanya faktor tertentu dan adanya hak-hak anak yang harus dilindungi, maka Majelis Hakim berpendapat patut untuk mempertimbangkan permohonan yang diajukan Pemohon I dan Pemohon II, dan dalam hal ini sesuai dengan Pasal 7 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa menurut hukum, mengisbatkan perkawinan yang dilangsungkan secara sirri atau di bawah tangan, hanya dimungkinkan apabila perkawinan tersebut sah, dan tolak ukur keabsahan suatu perkawinan bagi orang Islam menurut Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo. Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam adalah apabila perkawinan dilakukan menurut Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 27 Maret 1998 di Desa Kian Darat, Kecamatan Seram Timur, Kabupaten Maluku Tengah (Sekarang Desa Administratif Artafella, Kecamatan Kian Darat, Kabupaten Seram Bagian Timur), telah sesuai dengan hukum Islam dan telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan serta tidak bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dan telah memenuhi maksud ketentuan Pasal 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II untuk mendapatkan isbat nikah telah terbukti dan beralasan hukum, oleh karenanya permohonan Pemohon I dan Pemohon II dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 36 Undang-Undang Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan yang menyatakan bahwa dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan

Hal. 13 dari 16 hal. Pen. No. 4/Pdt.P/2021/PA.Dth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akta perkawinan, pencatatan perkawinan dilakukan setelah adanya penetapan pengadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon I dan Pemohon II telah terbukti dan telah dikabulkan, maka untuk memenuhi ketentuan Pasal 36 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan jo. Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan jo. Pasal 5 Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis Hakim perlu memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan perkawinannya pada Kantor Urusan Agama Kecamatan yang mewilayahi tempat tinggal Pemohon I dan Pemohon II yaitu Kantor Urusan Agama Kecamatan Kian Darat, Kabupaten Seram Bagian Timur;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II, akan tetapi oleh karena Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan berperkara secara prodeo, maka berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan Agama Dataran Hunimoa Nomor 4/Pdt.P/2021/PA.Dth tanggal 08 Maret 2021, Pemohon I dan Pemohon II telah diberi izin untuk berperkara secara bebas biaya (prodeo), sesuai ketentuan Pasal 273 R.Bg., dan biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada negara, sesuai ketentuan Pasal 60B dan Pasal 60C Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama jo. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum bagi masyarakat tidak mampu di Pengadilan;

Mengingat Pasal 273 RBg dan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;

Hal. 14 dari 16 hal. Pen. No. 4/Pdt.P/2021/PA.Dth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (Hakim Boufakar bin Abd. Rahim Boufakar) dengan Pemohon II (Nursia Kelsaba binti Ismail Kelsaba) yang dilaksanakan pada tanggal 27 Maret 1998 di Desa Kian Darat, Kecamatan Seram Timur, Kabupaten Maluku Tengah (Sekarang Desa Administratif Artafella, Kecamatan Kian Darat, Kabupaten Seram Bagian Timur);
3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mendaftarkan perkawinannya ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Kian Darat, Kabupaten Seram Bagian Timur;
4. Biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp1.280.000,00 (satu juta dua ratus delapan puluh ribu rupiah) dibebankan kepada negara;

Demikian penetapan ini ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Senin, tanggal 29 Maret 2021 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 15 Sya'ban 1442 *Hijriyah*, oleh kami **Adi Sufriadi, S.H.I.**, sebagai Ketua Majelis, **Musthofa Isnianto, S.H.** dan **Sitti Salma Rumadaul, S.H.I.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut didampingi oleh para Hakim Anggota dan dibantu oleh **Abdurrahim Upuolat, S.H., M.H.** sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Musthofa Isnianto, S.H.

Adi Sufriadi, S.H.I.

Hakim Anggota,

Sitti Salma Rumadaul, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Abdurrahim Upuolat, S.H., M.H.

Hal. 15 dari 16 hal. Pen. No. 4/Pdt.P/2021/PA.Dth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya:

1. Proses	Rp 70.000,00
2. Panggilan Pemohon I	Rp 600.000,00
3. Panggilan Pemohon II	Rp 600.000,00
4. Meterai	Rp 10.000,00 +
Jumlah	Rp 1.280.000,00

Hal. 16 dari 16 hal. Pen. No. 4/Pdt.P/2021/PA.Dth